

# LAPORAN KEUANGAN



**Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran  
[BA.019]**

**Semester II Tahun Anggaran 2022  
Periode Berakhir 31 Desember 2022**



**Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian**  
Jl. Tentara Pelajar No.12 Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor  
Jawa Barat 16114

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bogor, 31 Desember 2022

Kepala Balai Besar,

Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si  
NIP. 197308291999031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja Pegawai

B.3. Belanja Barang

B.4. Belanja Modal

B.4.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.7. Aset Tetap Belum Diresgister

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Ekuitas

C.4.1. Ekuitas

- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Pegawai
  - D.3. Beban Persediaan
  - D.4. Beban Barang dan Jasa
  - D.5. Beban Pemeliharaan
  - D.6. Beban Perjalanan Dinas
  - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
  - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.9. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
  - D.10. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit-LO
  - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
    - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
    - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
    - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
    - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1. Revisi DIPA/POK
  - F.2. Laporan Hasil Pemeriksaan
  - F.3. Belanja Akun COVID
  - F.4. Hibah

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, 31 Desember 2022

Kepala Balai Besar,

Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si

NIP. 197308291999031001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp668.434.405,00 atau mencapai 102,84% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp650.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.351.266.715,00 atau mencapai 96,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.968.589.000,00.

### II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp131.398.972.219,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp537.120.188,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp130.842.951.781,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp18.900.250,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp131.398.972.219,00.

### III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp664.399.028,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.301.857.881,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp24.637.458.853,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp4.035.377,00 dan Defisit Rp24.633.423.476,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp24.633.423.476,00.

### IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp136.526.328.557,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp24.633.423.476,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.506.067.138,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp131.398.972.219,00.

#### **V. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN  
PERTANIAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	650.000.000,00	668.434.405,00	102,84	1.482.159.750,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>650.000.000,00</b>	<b>668.434.405,00</b>	<b>102,84</b>	<b>1.482.159.750,00</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.2.	9.808.292.000,00	9.305.266.682,00	94,87	10.290.492.637,00
Belanja Barang	B.3.	9.568.722.000,00	9.520.220.849,00	99,49	33.465.190.827,00
Belanja Modal	B.4.	591.575.000,00	525.629.000,00	88,85	645.186.230,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>19.968.589.000,00</b>	<b>19.351.116.531,00</b>	<b>96,91</b>	<b>44.400.869.694,00</b>

**II. NERACA****BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN  
PERTANIAN****NERACA****PER 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.	534.009.188,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	3.111.000,00	954.000,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>537.120.188,00</b>	<b>954.000,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2.1.	90.730.352.000,00	90.730.352.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	90.960.239.478,00	90.420.141.478,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.360.743.230,00	24.360.743.230,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	4.535.938.800,00	4.535.938.800,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	97.294.780,00	97.294.780,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6.	(80.159.616.507,00)	(73.639.847.731,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.2.7.	318.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>130.842.951.781,00</b>	<b>136.504.622.557,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	32.060.000,00	32.060.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	0,00	153.900.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.3.3.	(13.159.750,00)	(165.208.000,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>18.900.250,00</b>	<b>20.752.000,00</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>131.398.972.219,00</b>	<b>136.526.328.557</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.4.1.	131.398.972.219,00	136.526.328.557,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>131.398.972.219,00</b>	<b>136.526.328.557,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>131.398.972.219,00</b>	<b>136.526.328.557,00</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN  
PERTANIAN**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	664.399.028,00	1.396.054.650,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>664.399.028,00</b>	<b>1.396.054.650,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2.	9.305.266.682,00	10.290.492.637,00
Beban Persediaan	D.3.	1.059.655.154,00	13.557.695.749,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5.188.139.803,00	10.532.830.228,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	2.115.399.910,00	2.730.040.439,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.154.868.982,00	6.686.763.711,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	4.158.637.208,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	6.478.527.350,00	7.860.606.657,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>25.301.857.881,00</b>	<b>55.817.066.629,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(24.637.458.853,00)</b>	<b>(54.421.011.979,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	4.035.377,00	4.244.742.308,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>4.035.377,00</b>	<b>4.244.742.308,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(24.633.423.476,00)</b>	<b>(50.176.269.671,00)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN  
PERTANIAN**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1.	136.526.328.557,00	143.774.684.284,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2.	(24.633.423.476,00)	(50.176.269.671,00)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3.	0,00	8.101.000,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	8.101.000,00
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4.	19.506.067.138,00	42.919.812.944,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		(5.127.356.338,00)	(7.248.355.727,00)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5..</b>	<b>131.398.972.219,00</b>	<b>136.526.328.557,00</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah satker yang ber-eselon II-B dan merupakan pengembangan dari : (1) Balai Penelitian Pascapanen Pertanian (Balitpasca), sesuai SK Menteri Pertanian No.76/Kpts/OT.210/1/2002 tanggal 29 Januari 2002 dan (2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, sesuai SK Menteri Pertanian No.632/Kpts/OT.140/12/2003 tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.36/PERMENTAN/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian memiliki tugas melaksanakan dan merumuskan program penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian.

Dengan perubahan status organisasi tersebut, maka diperlukan kelembagaan yang mapan dan sumber daya yang kuat dan handal dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan pascapanen. Semakin luasnya jangkauan penelitian dan pengembangan, semakin besar pula sumber daya, sumber dana, pengelolaan administrasi keuangan dan kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian berkomitmen, untuk kurun waktu 2020-2024 mempunyai visi ***“Menjadi Lembaga Penelitian Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Pascapanen Pertanian Mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menghasilkan teknologi dan inovasi pascapanen pertanian yang produktif, efisien, ramah lingkungan bernilai scientific dan impact recognition mendukung pertanian maju, mandiri dan modern;
2. Mewujudkan Institusi yang transparan, profesional dan memiliki akuntabilitas kinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya, dalam kurun waktu 2020 – 2024, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan teknologi pascapanen pertanian yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap diadopsi/dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna), dengan indikator tujuan : (a) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pascapanen yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir); dan (b) Rasio hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen yang dilakukan pada tahun berjalan (%).
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, dengan indikator tujuan: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

3. Mewujudkan pengelolaan anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator tujuan: Nilai Kinerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku).

Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Dimanfaatkannya inovasi dan teknologi Pascapanen Pertanian dengan indikator sasaran: (a) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pascapanen yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir); dan (b) Rasio hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen yang dilakukan pada tahun berjalan (%).
2. Terwujudnya birokrasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada layanan prima, dengan indikator sasaran Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.
3. Terkelolanya Anggaran Balitbangtan yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Kinerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku).

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seiring dengan pelaksanaan *roll out* SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022, pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang serta Modul *General Ledger* dan Pelaporan/GLP).

## **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah sebagai berikut:

##### **(1) Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### **(2) Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usung yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
  - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah;
  - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### (7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.350.000.000,00	650.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>650.000.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.985.100.000,00	9.666.727.000,00
Belanja Lembur	87.300.000,00	141.565.000,00
Belanja Barang Operasional	2.602.544.000,00	2.752.983.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.377.893.000,00	948.786.000,00
Belanja Barang Persediaan	5.484.373.000,00	1.204.961.000,00
Belanja Jasa	1.853.904.000,00	1.530.932.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.163.304.000,00	1.973.119.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.695.867.000,00	1.157.941.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	591.575.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>28.550.285.000,00</b>	<b>19.968.589.000,00</b>

### B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp668.434.405,00 atau mencapai 102,84% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>Akun Pendapatan</b>			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	857.500,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	650.000.000,00	660.220.000,00	101,57

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	600.000,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	2.721.528,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	377,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	4.035.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>668.434.405,00</b>	<b>102,84</b>

Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 54,90% jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan antara lain : (1). Adanya perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian dimana Peneliti dan kegiatan Riset beralih ke BRIN, sehingga konsumen atas penggunaan jasa analisa Laboratorium Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian berkurang/menurun; (2). Dengan masa pemulihan perekonomian nasional sebagai dampak dari Pandemi COVID-19, menjadikan masih banyaknya pelaku-pelaku ekonomi yang belum maksimal dalam melakukan kegiatan. Sehingga hal ini berdampak juga terhadap penerimaan jasa analisa laboratorium pada Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian dari sektor swasta/perorangan.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Pendapatan Dari Penjualan , Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	857.500,00	6.470.000,00	-86,75
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	660.220.000,00	1.383.945.000,00	-52,29
Pendapatan Pendidikan, Budaya Riset, dan Teknologi	600.000,00	2.864.000,00	-79,05
Pendapatan Denda	2.721.528,00	2.775.150,00	-1,93
Pendapatan Lain-lain	4.035.377,00	86.105.600,00	-95,31
<b>Jumlah</b>	<b>668.434.405,00</b>	<b>1.482.159.750,00</b>	<b>-54,90</b>

## B.2 BELANJA

Realisasi Belanja periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.351.266.715,00 atau 96,91% dari anggaran belanja sebesar Rp28.550.285.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	.%
<b>Akun Belanja</b>			
Belanja Pegawai	9.305.266.866,00	9.305.266.866,00	94,87
Belanja Barang	9.568.722.000,00	9.520.370.849,00	99,49
Belanja Modal	591.575.000,00	525.629.000,00	88,85
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>19.968.589.000,00</b>	<b>19.351.266.715,00</b>	<b>96,91</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>150.184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>19.968.589.000,00</b>	<b>19.351.116.531,00</b>	<b>96,91</b>

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 56,57% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian dimana kegiatan Penelitian/Riset yang semula berada di Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian beralih ke BRIN, sehingga alokasi pagu anggaran belanja tahun 2022 menurun sebesar Rp25.691.508.000,00 atau 56,27% dari tahun anggaran 2021;
2. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian yang mewajibkan Peneliti beralih ke BRIN, mengakibatkan serapan alokasi pagu anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS tidak dapat terealisasi.
3. Adanya perencanaan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium. Yang mana pada saat perencanaan, nilai barang atas pengadaan alat laboratorium dalam e-Katalog berada di posisi lebih tinggi dari pada saat pelaksanaan. Sehingga terdapat alokasi pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang tidak terserap.

Perbandingan Realisasi Belanja  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	.%
Belanja Pegawai	9.305.266.866,00	10.305.666.401,00	-9,71
Belanja Barang	9.520.370.849,00	33.609.309.312,00	-71,67
Belanja Modal	525.629.000,00	645.186.230,00	-18,53
<b>Total Belanja</b>	<b>19.351.266.715,00</b>	<b>44.560.161.943,00</b>	<b>-56,57</b>

### B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.305.266.866,00 dan Rp10.305.666.401,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja periode 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 9,57% dari periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan :

1. Adanya perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian dimana 32 PNS dengan jabatan Peneliti Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian beralih ke BRIN, sehingga serapan alokasi pagu anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan tahun anggaran 2022 tidak terserap secara maksimal;
2. Pada tahun anggaran 2022 terdapat 4 pegawai Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian yang pensiun dan 2 pegawai yang meninggal, sehingga serapan alokasi belanja pegawai berkurang.

Perbandingan Belanja Pegawai  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.180.908.866,00	10.229.363.401,00	-10,25
Belanja Lembur	124.358.000,00	76.303.000,00	62,98
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.305.266.866,00</b>	<b>10.305.666.401,00</b>	<b>-9,71</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>184,00</b>	<b>15.173.764,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.305.266.682,00</b>	<b>10.290.492.637,00</b>	<b>-9,57</b>

#### B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.520.370.849,00 dan Rp33.465.190.827,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 71,55% dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian dimana kegiatan Penelitian/Riset yang semula berada di Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian beralih ke BRIN, sehingga berdampak pada menurunnya alokasi pagu anggaran belanja barang tahun anggaran 2022.

Perbandingan Belanja Barang  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.734.549.209	2.673.618.041,00	2,28
Belanja Barang Non Operasional	941.167.787	5.533.847.710,00	-82,99
Belanja Barang Persediaan	1.204.679.724	13.872.824.619,00	-91,32
Belanja Jasa	1.512.422.807	2.328.064.477,00	-35,04
Belanja Pemeliharaan	1.972.532.340	2.372.772.269,00	-16,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.155.018.982	6.828.182.196,00	-83,08
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.520.370.849,00</b>	<b>33.609.309.312,00</b>	<b>-71,67</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.118.485,00</b>	<b>-99,90</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.520.220.849,00</b>	<b>33.465.190.827,00</b>	<b>-71,55</b>

#### B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp525.629.000,00 dan Rp645.186.230,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada periode 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 18,53% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan berkurangnya alokasi pagu anggaran belanja modal sebesar Rp65.879.000,00 atau 10,02% dari tahun anggaran 2021, dan hanya teralokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin. Untuk alokasi belanja penambahan nilai gedung dan bangunan di tahun anggaran 2022 tidak ada.

Perbandingan Belanja Modal  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525.629.000,00	149.500.000,00	251,59
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	495.686.230,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>525.629.000,00</b>	<b>645.186.230,00</b>	<b>-18,53</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>525.629.000,00</b>	<b>645.186.230,00</b>	<b>-18,53</b>

#### B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp525.629.000,00 dan Rp149.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022 terjadi kenaikan sebesar 251,59% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2022 dibutuhkan beberapa alat laboratorium untuk mendukung pelaksanaan operasional uji analisa Laboratorium Balai Besar Litbang Pascapanen.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525.629.000,00	149.500.000,00	251,59
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>525.629.000,00</b>	<b>149.500.000,00</b>	<b>251,59</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>525.629.000,00</b>	<b>149.500.000,00</b>	<b>251,59</b>

#### B.5.2. BELANJA PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp495.686.230,00. Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 100,00% dibandingkan periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan tahun anggaran 2022 tidak ada alokasi pagu anggaran dan belanja penambah nilai gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2021</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	495.686.230,00	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686.230,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>495.686.230,00</b>	<b>-100,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. ASET LANCAR

#### C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp534.009.188,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022
Pendapatan dana hibah AFACI dengan No. Register 2EGMQPNA	534.009.188,00
<b>Jumlah</b>	<b>534.009.188,00</b>

#### C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.111.000,00 dan Rp954.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	3.111.000,00	954.000,00
Bahan Baku	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>954.000,00</b>

Barang persediaan konsumsi sebesar Rp3.111.000,00 merupakan barang persediaan berupa penjepit kertas sebesar Rp28.000,00; odner dan map sebesar Rp340.000,00, isi staples sebesar Rp 143.000,00 dan tinta/toner printer sebesar Rp2.600.000,00

## C.2. ASET TETAP

### C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp90.730.352.000,00 dan Rp90.730.352.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>90.730.352.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Awal	90.730.352.000,00
<b>Saldo per 30 September 2022</b>	<b>90.730.352.000,00</b>

Tanah dengan alamat Jl. Tentara Pelajar No.12 Cimanggu Bogor Rt.04/007, Bogor Tengah dan merupakan tempat berdirinya kantor Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian merupakan tanah yang sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2022 adalah tanah dengan kepemilikan dan sertifikat atas nama Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Sedangkan untuk tanah dengan alamat Jl. Surotokunto Rawabagus Karawang Timur adalah tanah dengan kepemilikan dan sertifikat atas nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Dimana di atasnya berdiri kantor Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal yang merupakan kantor laboratorium dengan kepemilikan gedung bangunan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

Rincian Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	0,00 m2	Tentara Pelajar No.12 Cimanggu Bogor Rt.04/007, Bogor Tengah	-
2	9.760,00 m2	Surotokunto Rawabagus Karawang Timur	33.449.472.000
3	11.025,00 m2	Surotokunto Rawabagus Karawang Timur	37.784.880.000
4	4.874,00 m2	Surotokunto Rawabagus Karawang Timur	19.496.000.000
Jumlah			90.730.352.000,00

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp90.960.239.478,00 dan Rp90.420.141.478,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>90.420.141.478,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	525.629.000,00
Transfer Masuk	332.469.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>91.278.239.478,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	75.810.332.663,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>15.467.906.815,00</b>

Mutasi tambah atas transfer masuk dari :

1. Pembelian atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp525.629.000,00, terdiri dari:
  - a. Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 buah senilai Rp21.000.000,00
  - b. Mixer 1 buah senilai Rp80.000.000,00
  - c. Stomacher 1 buah senilai Rp43.000.000,00
  - d. Vortex Mixer 2 buah senilai Rp3.840.000,00
  - e. Automatic Pipet Dispenser 1 buah senilai Rp13.764.000,00
  - f. Burette 1 buah senilai Rp19.440.000,00
  - g. GC MS 1 buah senilai Rp14.985.000,00
  - h. Ph Meter Bench 1 buah senilai Rp11.600.000,00
  - i. Nitrogen Analyzer Distillation System : Buchi K-365 Easykjel Kjeldahl System 1 buah senilai Rp318.000.000,00
  
2. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebesar Rp30.169.000,00 dengan BAST No. B-797/PL.310/H.1.1/03/2021 tanggal 28 Maret 2022 dan rincian sbb :
  - a. Bracket Standing (Kenzo KZ-52) 1 buah senilai Rp1.700.000,00;
  - b. Televisi (Sharp LED TV 42") 1 buah senilai Rp6.169.000,00;
  - c. Laptop (Lenovo Slim 3i) 2 buah senilai Rp15.600.000,00;
  - d. PC Unit (Lenovo AIO V1.30 201 GM) 1 buah senilai Rp6.700.000,00.
  
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp302.300.000,00 dengan BAST No.B-330.1/PL.130/H.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan rincian sbb :
  - a. Rak-Rak Penyimpan (Meja Peniris) 30 buah senilai Rp2.200.000,00;
  - b. Rak-Rak Penyimpan (Meja Peniris) 31 buah senilai Rp2.200.000,00
  - c. Alat Pasca Panen Lainnya (Pemecah Kacang) 1 buah senilai Rp5.830.000,00;
  - d. Alat Pasca Panen Lainnya (Spiner) 2 buah senilai Rp4.900.000,00;
  - e. Alat Pasca Panen Lainnya (Alat Sosoh Kering dengan Blower + Upgrade) 3 buah senilai Rp28.000.000,00;
  - f. Kontainer (Box Motor Fiberglass Karya Tempe Madiri) 1 buah senilai Rp2.800.000,00;
  - g. Kontainer (Box Motor Fiberglass Karya Tempe Madiri) 2 buah senilai Rp2.800.000,00;
  - h. Panci (Panci Stainless 300 L) 1 buah senilai Rp3.300.000,00;
  - i. Slicer (Slicer) 1 buah senilai Rp3.500.000,00;
  - j. Slicer (Mesin Meat Slicer MKS-M8) 2 buah senilai Rp4.310.000,00;
  - k. Food Processor (Food Processor) 1 buah senilai Rp1.950.000,00;
  - l. Muffle Furnace (Tanur/Furnace Neytech) 3 buah senilai Rp37.125.000,00;
  - m. Unit Ekstraksi (Soxhlet Extractor Apparatus IWAKI) 1 buah senilai Rp17.325.000,00;

- n. Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian) (CT3 Texture Analyzer Brockfield) 25 buah senilai Rp181.500.000,00;
- o. Drum (Drum Stainless) 3 buah senilai Rp2.280.000,00;
- p. Drum (Drum Stainless) 4 buah senilai Rp2.280.000,00.

Terdapat selisih antara Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2022 dengan saldo mutasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp318.000.000,00. Nilai tersebut adalah Aset Tetap yang Belum Diregister pada Neraca per 31 Desember 2022 berupa pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI Modul Aset. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan pencatatan BAST/BG Final pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen, setelah dilakukan tutup periode Aset bulan ke-12. Sesuai arahan KPPN 023 Bogor dan DJPB, pendetailan Aset sebesar Rp318.000.000,00 agar dilakukan pada periode bulan ke-13 pada aplikasi SAKTI Modul Aset.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.360.743.230,00 dan Rp24.360.743.230,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>24.360.743.230,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan Bangunan Gedung Kantor Permanen	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>24.360.743.230,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	3.059.873.750,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>21.300.869.480,00</b>

Sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2022 tidak terjadi perubahan nilai perolehan atas nilai gedung dan bangunan dari periode 31 Desember 2021.

### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.535.938.800,00 dan Rp4.535.938.800,00.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>4.535.938.800,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pengembangan	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>4.535.938.800,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	923.477.505,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>3.612.461.295,00</b>

Pada periode pelaporan 31 Desember 2022 tidak terjadi perubahan nilai perolehan atas nilai jalan, irigasi dan jaringan dari periode 31 Desember 2021.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp97.294.780,00 dan Rp97.294.780,00 berupa monografi.

### C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp80.159.616.507,00 dan Rp73.639.847.731,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	90.960.239.478,00	75.810.332.663,00	15.149.906.815,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.360.743.230,00	3.369.916.788,00	20.990.826.442,00
3.	Jalan dan Jembatan	40.925.000,00	31.812.551,00	9.112.449,00
4.	Irigasi	1.651.327.000,00	195.318.244,00	1.456.008.756,00
5.	Jaringan	2.843.686.800,00	752.236.261	2.091.450.539,00
6.	Aset Tetap Lainnya	97.294.780,00	0,00	97.294.780,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>119.954.216.288,00</b>	<b>80.159.616.507,00</b>	<b>39.794.599.781,00</b>

### C.2.7. Aset Tetap yang Belum Diregister

Nilai Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp318.000.000,00 dan Rp0,00. Terdapatnya nilai Aset Tetap yang Belum Diregister tersebut disebabkan pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin yang belum didetailkan pada aplikasi SAKTI Modul Aset. Hal ini karena keterlambatan pencatatan BAST/BG Final pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen, setelah dilakukan tutup periode Aset bulan ke-12. Sesuai arahan KPPN 023 Bogor dan DJPB, pendetailan Aset sebesar Rp318.000.000,00 agar dilakukan pada periode bulan ke-13 pada aplikasi SAKTI Modul Aset.

## C.3. ASET LAINNYA

### C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp32.060.000,00 dan Rp32.060.000,00. Aset Tak

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	700.000,00
Paten	31.360.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.060.000,00</b>

### C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp153.900.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Lain-lain sebesar Rp153.900.000,00 yang tercatat pada periode pelaporan 31 Desember 2022 ini adalah kendaraan dinas roda 4 minibus kijang LGX B 2096 HQ yang bukan dalam kondisi rusak berat, melainkan disebabkan karena hilang sehingga tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian dan telah dilakukan penghapusan dari Aset dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 538/KPTS/PL.320/A/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Kementerian Pertanian (Kode Satker 0180902648669000KD).

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.159.750,00 dan Rp165.208.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	32.060.000,00	13.159.750,00	18.900.250,00
2.	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>32.060.000,00</b>	<b>13.159.750</b>	<b>18.900.250,00</b>

#### **C.4. EKUITAS**

##### **C.4. Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp131.398.972.219,00 dan Rp136.526.328.557,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp664.399.028,00 dan Rp1.396.054.650,00. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp664.399.028,00 yang terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	857.500,00	6.470.000,00	-86,75
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	660.220.000,00	1.383.945.000,00	-52,29
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	600.000,00	2.864.000,00	-79,05
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.721.528,00	2.775.150,00	1,93
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	2.864.000,00	-100,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0,00	500,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>664.399.028,00</b>	<b>1.396.054.650,00</b>	<b>-52,41</b>

Pada periode 31 Desember 2022, pendapatan negara bukan pajak terjadi penurunan sebesar 52,41% dari periode 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan :

1. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan yang terjadi penurunan sebesar 86,75% dan merupakan pendapatan dari sewa rumah negara golongan II type C permanen. Penurunan pendapatan disebabkan, (b). pada bulan Juli 2022 terdapat pengalihan pembayaran gaji dan tunjangan berikut potongan pendapatan atas sewa rumah negara dari Peneliti yang beralih ke BRIN. Dimana pada saat penyerahan ADK GPP ke BRIN, masih terdapat potongan sewa rumah negara sebesar Rp122.500,00 per bulan. (a). terdapat pembayaran sewa gedung atas KPRI Pascapanen yang lewat tahun anggaran 2022;
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya terjadi penurunan sebesar 52,29%. Pendapatan ini diperoleh dari hasil uji jasa analisa Laboratorium Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian. Penurunan pendapatan disebabkan adanya perubahan struktur organisasi Eselon 1 Badan Litbang Pertanian, dimana kegiatan Riset/Penelitian dialihkan ke BRIN. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan atas jasa analisa laboratorium pada Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian dari kegiatan Riset/Penelitian;
3. Pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya yang merupakan pendapatan dari jasa magang pembuatan tepung pada Laboratorium Pengembangan Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian terjadi penurunan sebesar 79,05%. Penurunan disebabkan telah beralihnya Peneliti ke BRIN,

sehingga berdampak pada berkurangnya pihak luar yang menggunakan jasa magang pada Laboratorium Litbang Pascapanen Pertanian;

4. Pendapatan hasil penelitian/riset dan hasil pengembangan iptek mengalami penurunan 100,00% merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil perlakuan kegiatan revitalisasi Rice Milling Unit (RMU). Penurunan ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2022 sudah tidak ada kegiatan Riset/Penelitian;
5. Pendapatan anggaran lain-lain mengalami penurunan 100,00%. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat pendapatan yang diperoleh karena adanya koreksi penerimaan negara atas pengembalian sisa TUP yang lebih bayar/lebih setor ke Kas Negara sebesar Rp500,00, sedangkan periode 31 Desember 2022 tidak ada.

## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.305.266.682,00 dan Rp10.290.492.637,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5.728.491.580,00	6.377.192.420,00	-10,17
Beban Pembulatan Gaji PNS	82.635,00	86.553,00	-4,53
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	393.763.508,00	469.120.026,00	-16,06
Beban Tunj. Anak PNS	121.168.080,00	135.449.112,00	-10,54
Beban Tunj. Struktural PNS	42.070.000,00	41.930.000,00	0,33
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.513.070.000,00	1.785.600.000,00	-15,26
Beban Tunj. PPh PNS	95.395.899,00	107.765.026,00	-11,48
Beban Tunj. Beras PNS	320.023.980,00	353.047.500,00	-9,35
Beban Uang Makan PNS	861.983.000,00	850.594.000,00	1,34
Beban Tunjangan Umum PNS	104.860.000,00	93.405.000,00	12,26
Beban Uang Lembur	124.358.000,00	76.303.000,00	62,98
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(184)	0,00	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>9.305.266.682,00</b>	<b>10.290.492.637,00</b>	<b>-9,57</b>

Dari tabel di atas, Beban Pegawai per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 9,57% dari 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan perubahan struktur organisasi Eselon-1 Badan Litbang Pertanian dimana 32 PNS dengan jabatan Peneliti beralih ke BRIN, sehingga biaya untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang menjadi beban pegawai Balai Besar Litbang Pascapanen berkurang.

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp184,00. Selisih tersebut adalah pengembalian belanja pembulatan gaji PNS tahun anggaran 2022.

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.655.154,00 dan Rp13.557.695.749,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	874.296.454,00	4.238.845.959,00	-79,37
Beban Persediaan bahan baku	163.990.700,00	204.278.542,00	-19,72
Beban Persediaan Lainnya	21.368.000,00	9.114.571.248,00	-99,77
<b>Jumlah</b>	<b>1.059.655.154,00</b>	<b>13.557.695.749,00</b>	<b>-92,18</b>

Dari tabel di atas, Beban persediaan atas barang-barang habis pakai per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 92,18%. Hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi pagu anggaran untuk biaya persediaan, sehingga konsumsi atas barang habis pakai dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Balai Besar Litbang Pascapanen yang menjadi beban persediaan terjadi penurunan.

Dari saldo awal persediaan sebesar Rp954.000,00 ditambah pembelian barang persediaan sebesar Rp1.204.679.724,00 dikurangi saldo akhir persediaan sebesar Rp3.111.000,00, terdapat beban persediaan sebesar Rp1.202.522.724. Dari beban persediaan tersebut, terdapat selisih dengan beban persediaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.867.570,00. Selisih tersebut adalah beban persediaan yang dicatat sebagai beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp135.062.170 dan beban persediaan suku cadang sebesar Rp7.805.400,00.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.188.139.803,00

dan Rp10.532.830.228,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.367.939.000,00	2.275.981.000,00	4,04
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12.985.341,00	12.998.041,00	-0,10
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	177.856.000,00	206.682.000,00	-13,95
Beban Barang Operasional Lainnya	175.768.868,00	98.865.000,00	77,79
Beban Bahan	594.001.452,00	656.665.066,00	-9,54
Beban Honor Output Kegiatan	109.700.000,00	205.200.000,00	-46,54
Beban Barang Non Operasional Lainnya	237.466.335,00	546.328.398,00	-56,53
Beban Langganan Listrik	1.270.561.498,00	1.127.070.479,00	12,73
Beban Langganan Telepon	27.686.709,00	28.237.726,00	-1,95
Beban Langganan Air	157.431.600,00	94.782.100,00	66,10
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.365.000,00	2.382.000,00	-0,71
Beban Sewa	9.003.000,00	74.712.000,00	-87,95
Beban Jasa Profesi	43.600.000,00	111.495.000,00	-60,90
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.775.000,00	581.545.172,00	-99,69
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	3.772.500,00	-100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	75.319.500,00	-100,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	4.122.954.246,00	-100,00
Beban Jasa Konsultan	0,00	13.090.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	0,00	294.750.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.188.139.803,00</b>	<b>10.532.830.228,00</b>	<b>-50,74</b>

Dari tabel di atas, Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 50,74%. Hal ini disebabkan penggunaan/pemakaian jasa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian pada tahun anggaran berjalan 2022 terjadi penurunan. Penurunan atas pemakaian barang dan jasa tersebut disebabkan pada tahun anggaran 2022 tidak

terdapat alokasi pagu anggaran untuk biaya program Pemulihan Ekonomi Nasional penanganan pandemi COVID-19 dengan nilai besar, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atas konsumsi barang dan jasa serta berkurangnya alokasi pagu anggaran untuk biaya belanja barang dan jasa atas kegiatan Riset/Penelitian yang telah beralih ke BRIN.

Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.775.000,00 adalah biaya atas jasa swab antigen pegawai Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian.

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.115.399.910,00 dan Rp2.730.040.439,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 1

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.027.117.536,00	1.083.347.500,00	-5,19
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	811.962.805,00	1.155.990.905,00	-29,76
Beban Pemeliharaan Jaringan	107.966.999,00	112.933.864,00	-4,40
Beban Pemeliharaan Lainnya	25.485.000,00	20.500.000,00	24,32
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	135.062.170,00	0,00	#DIV/0!
Beban Persediaan suku cadang	7.805.400,00	0,00	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	357.268.170,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.115.399.910,00</b>	<b>2.730.040.439,00</b>	<b>-22,51</b>

Dari tabel di atas, Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 22,51%. Hal ini tidak lain disebabkan adanya penurunan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin serta biaya persediaan bahan dalam rangka untuk pemeliharaan guna mempertahankan aset dalam kondisi normal.

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.154.868.982,00 dan Rp6.686.763.711,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi

untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.149.918.982,00	1.863.555.509,00	-38,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	25.950.000,00	-92,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	90.000.000,00	-96,67
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	4.707.258.202,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.154.868.982,00</b>	<b>6.686.763.711,00</b>	<b>-82,73</b>

Dari tabel di atas, Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 82,73%. Hal ini disebabkan berkurangnya alokasi pagu anggaran biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Penelitian/Riset dengan beralih ke BRIN.

#### D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.158.637.208,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	838.159.233,00	-100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	3.168.263.940,00	-100,00
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	124.264.035,00	-100,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	27.950.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.637.208,00</b>	<b>-100,00</b>

Dari tabel di atas, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 100,00%. Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat alokasi pagu anggaran untuk biaya Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat.

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.478.527.350,00 dan Rp7.860.606.657,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.744.810.419,00	7.134.073.585,00	-19,47
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	620.086.077,00	612.902.218,00	1,17
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.784.100,00	5.784.100,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	35.512.408,00	35.512.408,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	70.482.596,00	70.482.596,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	1.851.750,00	1.851.750,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.478.527.350,00</b>	<b>7.860.606.657,00</b>	<b>-17,58</b>

Dari tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 terjadi penurunan sebesar 17,58%. Hal ini disebabkan seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai susut aset tetap per 31 Desember 2022 yang lebih rendah dari pada nilai susut aset tahun 2021.

**D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	377,00	9.360.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.035.000,00	76.745.100,00	-94,74
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	4.158.637.208,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.035.377,00</b>	<b>4.244.742.308</b>	<b>-99,90</b>

Dari tabel di atas, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar 99,90%. Hal ini disebabkan berkurangnya penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang tahun anggaran yang lalu atas penyelesaian TP/TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan terhadap pihak ketiga.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 136.526.328.557,00 dan Rp 143.774.684.284,00.

### E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.633.423.476,00 dan Rp50.176.269.671,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.101.000,00.

#### E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.101.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.506.067.138,00 dan Rp42.919.812.944,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas  
per 31 Desember 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.995.955.719,00
Diterima dari Entitas Lain	-668.434.405,00
Transfer Masuk	289.375.824,00
Pengesahan Hibah Langsung	889.170.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.500.170.000,00</b>

**E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo DDEL adalah sebesar Rp668.434.405,00 sedangkan DKEL sebesar Rp18.995.955.719,00.

**E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat transfer masuk dari Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp332.469.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp43.093.176,00. Sehingga netto transfer masuk sebesar Rp289.375.824,00

**E.5. Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp131.398.972.219,00 dan Rp136.526.328.557,00.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Revisi DIPA/POK

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA 018.09.2.648669/2022, tanggal 17 Nopember 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp28.550.285.000,00. Dalam pelaksanaannya selama bulan Januari – September 2022 telah melaksanakan 9 (delapan) kali revisi DIPA/POK terhadap pagu DIPA Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian.

**Revisi DIPA/POK ke-1** tanggal 17 Maret 2022. Dengan terbitnya Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait peralihan tusi penelitian, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) dialihkan ke BRIN, sehingga DIPA lingkup Badan Litbang Pertanian TA 2022 diblokir (\*) pada Program Riset dan Inovasi IPTEK. Maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan realokasi anggaran TA. 2022 untuk mengakomodir kegiatan layanan yang harus tetap dilaksanakan tetapi diblokir seperti alokasi anggaran UHL/THL dan kerjasama.

**Revisi DIPA/POK ke-2** tanggal 3 Juni 2022. Karena adanya kebijakan Pemerintah terkait penambahan *Automatic Adjustment* (AA) atau Cadangan Anggaran Belanja Kementerian/Badan TA. 2022, dengan dilakukan pemblokiran (\*) anggaran di detail akun dan tidak mengurangi pagu anggaran total.

**Revisi DIPA/POK ke-3** tanggal 30 Juni 2022. Revisi mandiri dengan adanya penambahan anggaran Satker dari Dana Hibah Kerjasama pada KRO Koordinasi dan RO Layanan Kerjasama yaitu kegiatan Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia (*Establishment of Asian Food Composition Database Network*) dengan AFACI selama periode 3 tahun (Juli 2021 – Juni 2024). Anggaran untuk kegiatan (*Establishment of Asian Food Composition Database Network*) sebesar Rp355.854.000,00, sehingga pagu anggaran semula Rp28.550.285.000,00 menjadi Rp28.906.139.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-4** tanggal 27 September 2022. Realokasi anggaran ke BRIN untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan senilai Rp7.559.400.000,00 serta pemblokiran belanja pegawai secara rincian perhitungan kebutuhan pegawai yang pindah ke BRIN. Sehingga pagu anggaran semula Rp28.906.139.000,00 menjadi Rp21.346.739.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-5** tanggal 14 Oktober 2022. Adanya penambahan anggaran senilai Rp588.379.000,00 yang berasal dari pengurangan belanja pegawai, penambahan pada belanja barang non operasional untuk RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran serta belanja modal. Sehingga pagu anggaran semula Rp21.346.739.000,00 menjadi Rp21.935.118.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-6** tanggal 10 November 2022. Adanya penurunan target penerimaan dan penggunaan PNPB TA.2022. Sehingga pagu anggaran semula Rp21.935.118.000,00 menjadi Rp21.318.348.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-7** tanggal 25 November 2022. Adanya penambahan anggaran senilai Rp100.000.000,00 pada RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran. Sehingga pagu anggaran semula Rp21.318.348.000,00 menjadi Rp21.418.348.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-8** tanggal 2 Desember 2022. Adanya pengurangan anggaran dan realokasi pagu anggaran ke BA BUN senilai Rp1.449.759.000,00 dari blokir *Automatic Adjustment* senilai Rp338.847.000,00 dan dari blokir BRIN senilai Rp1.110.912.000,00. Sehingga pagu anggaran semula Rp21.418.348.000,00 menjadi Rp19.968.589.000,00.

**Revisi DIPA/POK ke-9** tanggal 10 Desember 2022. Penyesuaian dengan realokasi pagu anggaran gaji dan tunjangan dengan tidak mengurangi dan menambah pagu anggaran total.

## F.2 Laporan Hasil Pemeriksaan

### 1. A. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Keuangan UAKPA/B Lingkup Badan Litbang Kemtan oleh Itjen No. R.15/PW.110/G.4/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, terdapat beberapa temuan, antara lain :

- a) Terdapat selisih Beban persediaan (59) pada LO dengan Transaksi Pemakaian yang tercantum dalam aplikasi Laporan Persediaan sandal Rp357.268.170,00 berupa Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113) dan belum diungkapkan didalam CaLK;
- b) Terdapat mutasi kurang berupa penyerahan kepada masyarakat (pada kegiatan RPIK) berupa penyerahan peralatan dan mesin senilai Rp4.158.637.208,00 yang sudah dilengkapi dengan BAST. Terhadap mutasi kurang tersebut telah diungkapkan didalam CaLK, namun masih belum lengkap dan perlu perbaikan;
- c) Terdapat Aset yang belum dilakukan PSP berupa Peralatan dan mesin senilai Rp8.218.142.000,00;
- d) Terdapat Aset dalam proses PSP berupa: 1) Gedung dan Bangunan senilai Rp5.938.329,00; 2) Peralatan dan mesin senilai Rp4.874.610.500,00; dan 3) J1J senilai Rp4.535.938.800,00;
- e) Terdapat Aset Tetap dalam kondisi rusak berat berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 NUP senilai Rp518.072.000,00. Namun aset tersebut oleh satker akan dilakukan perbaikan, karena kondisinya masih bisa direnovasi;
- f) Terdapat penghapusan BMN senilai Rp153.900.000,00 berupa kendaraan roda empat mini bus yang hilang karena sebab pencurian, telah dilakukan audit BMN oleh ARP dan dalam usulan permohonan persetujuan penghapusan ke KPKNL melalui surat Kepala BB Pascapanen No. B384.2/PL.320/H.10/02/2021;
- g) Terdapat Hibah dari Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) senilai \$30,000 dengan jangka waktu selama 1 tahun yang belum direalisasikan.

### B. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu RKA-K/L Revisi Alokasi Anggaran TA 2022 Badan Litbang Pertanian oleh Itjen No. R.0040/PW.110/G.4/02/2022 tanggal 16 Februari 2022, terdapat beberapa temuan, antara lain :

Pagu Awal Satker BB Pascapanen senilai Rp28.550.285.000,00. Revisi dilakukan karena adanya realokasi Internal Satker senilai Rp410.000.000,00 yang diambil dari alokasi belanja modal senilai Rp300.000.000,00 dan Kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan senilai Rp110.000.000,00. Selain itu terdapat penambahan

anggaran Satker dari Dana Hibah Kerjasama dengan AFACI selama periode 3 tahun (Juli 2021 - Juni 2024) masing-masing tahun senilai USD 30.000. Pada tahun pertama periode Juli 2021 — Juni 2022 mendapatkan anggaran senilai Rp428.725.000,00 namun belum masuk DIPA BB Pascapanen, sehingga pagu Akhir Satker BB Pascapanen senilai Rp28.979.010.000,00.

Penambahan dan Pengurangan alokasi anggaran tersebut telah didukung dengan KAK/TOR dan RAB rinci. Hasil revidi sebagai berikut:

- 1) Penambahan Anggaran Satker dari Dana Hibah Kerjasama Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia dengan AFACI selama periode 3 tahun (Juli 2021 — Juni 2024) telah disetujui per tanggal 12 Juli 2021. Output Kegiatan tersebut berupa data dan informasi komposisi gizi 100 bahan pangan/pertanian, Buku SOP teknik analisa komponen zat gizi pangan dan pertanian.
- 2) Alokasi detail untuk masing-masing belanja pada RAB sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung output kegiatan di tahun pertama.
- 3) Memastikan kegiatan di tahun pertama ini selesai sebelum terbitnya Perpres 'Badan Baru'.
- 4) Melakukan koordinasi dengan AFACI terkait perubahan nama Badan Litbang Pertanian setelah definitifnya 'Badan Baru' dan bernegosiasi agar kegiatan kerjasama ini bisa tetap dilaksanakan di Organisasi Balai Besar atau jika memungkinkan melakukan penyesuaian output kegiatan.

**C. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Dukungan Manajemen TA 2021 dan 2022 oleh Itjen No. R.145/PW.130/G.4/06/2022 tanggal 6 Juni 2022, terdapat beberapa temuan, antara lain :**

Pada TA 2022 dilakukan audit kinerja/ketaatan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan TA 2020 dan TA 2021 pada Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Nomor LHA: R.0274/PW.130/G.4/09/2021 tanggal 1 September 2021. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, menunjukkan bahwa belum seluruh rekomendasi yang bersifat administrasi maupun teknis ditindaklanjuti oleh satker secara tuntas karena belum didukung dengan eviden, sedangkan terhadap temuan yang bersifat kerugian telah ditindaklanjuti oleh satker terkait.

Kegiatan The 3 International Conference on Agricultural Postharvest Handling and Processing (THE @ ICAPHP) TA 2021 Kegiatan yang dilaksanakan atas dasar surat perjanjian pelaksanaan kegiatan Nomor: 401/PL.040/H. 1/03/2021.K tanggal 2 Maret 2021 antara PPK Kerjasama kemitraan Penelitian Pertanian dan Pengembangan SDM dengan Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Pascapanen Pertanian. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut senilai Rp512.000.000,00, namun sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 belum ada realisasi anggaran.

- a. Kegiatan tersebut semula akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 24 s.d 26 Agustus 2021, namun mengingat pelaksanaan PPKM terus berlangsung maka kegiatan akan dialihkan di Bogor pada tanggal 12 s.d 13 Oktober 2021. Terhadap kondisi tersebut berimplikasi terhadap perubahan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan dan perubahan terhadap komponen biaya. Pihak BB Pascapanen telah mengajukan

- revisi proposal dan RAB, namun belum disahkan oleh PPK Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Ir. Erlita Adriani, MBA)
- b. Penanggungjawab kegiatan belum melakukan perencanaan secara matang terhadap jumlah peserta yang akan hadir pada kegiatan tersebut, baik luring maupun daring sehubungan adanya perubahan lokasi kegiatan. Peserta konferensi yang ditetapkan dalam proposal kegiatan belum dirinci dan tidak ditetapkan secara kuantitatif.

Hasil audit terhadap RAB dikemukakan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran belanja bahan berupa cetak momento narasumber dan moderator sebanyak 20 buah @Rp750.000,00 senilai Rp15.000.000,00 seharusnya hanya dialokasikan sebanyak 10 orang. Terhadap kondisi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh satker dengan memperbaiki RAB menjadi sebanyak 10 buah @Rp750.000,00 atau total senilai Rp7.500.000,00.
- b. Alokasi honorarium Ketua Pengarah sebanyak 1 OK senilai Rp1.000.000,00, seharusnya sesuai SBM TA 2021 tidak terdapat alokasi Ketua Pengarah, tetapi Pengarah.
- c. Anggota sebanyak 42 orang, sesuai SBM TA 2021 bahwa anggota kepanitiaan maksimal hanya sebanyak 10% dari peserta. Berdasarkan konfirmasi dari penanggungjawab kegiatan bahwa jumlah peserta daring dan luring diperkirakan mencapai 1.000 orang.
- d. Seminar kit berupa hand sanitizer, masker, faceshield, ballpoint, bJocknote, roll on Euca, Mug Tumbler dan Goodiebag belum dirinci volume dan harga satuannya.
- e. Bahan pendukung/pembantu launching dan pameran senilai Rp79.125.000,00 masih dalam satuan paket yang seharusnya dirinci sesuai dengan kebutuhan riil.
- f. Alokasi anggaran moderator dialokasikan sebanyak 8 OJ @ Rp1.000.000,00 atau total Rp8.000.000,00, seharusnya sesuai SBM TA 2021 maksimal senilai Rp700.000,00 orang/kali. Terhadap kondisi tersebut telah dilakukan perbaikan oleh satker.
- g. Terdapat alokasi Narsum (setingkat Menteri) 2 OJ @ Rp1.700.000,00 atau total Rp3.400.000,00 yang tidak diperkenankan dalam SBM TA 2021. Terhadap kondisi tersebut pihak satker lelah menindaklanjutinya saat audit, dengan tidak mengalokasikan Narsum setingkat Menteri dalam RAB.
- h. Berdasarkan RAB, belum dialokasikan transpor lokal untuk peserta yang berasal dari Bogor.
- i. Alokasi biaya perjalanan belum didasarkan atas kebutuhan, misalnya untuk perjalanan ke Bandung yang seharusnya dilaksanakan di Bogor. Dengan demikian seharusnya alokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan jumlah personilnya.

## 2. Tindak Lanjut

- A. a. Telah diungkapkan dalam CaLK:
  - 1) Satker melakukan pencatatan transaksi pemakaian barang pada aplikasi persediaan dengan akun 117113 (bahan untuk pemeliharaan) sebesar Rp357.268.170,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Bahan kimia untuk pembersihan sebesar Rp173.972.190,00;
    - b. Pengharum ruangan sebesar Rp153.737.680,00;

- c. Perabot kantor lainnya sebesar Rp29.558.300,00.
  - 2) Satker dalam proses penyiapan usul PSP;
  - 3) Satker telah memonitor perkembangan usulan PSP BMN tersebut, proses penetapan status penggunaan berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp5.938.329.000,00, telah terbit PSP Gedung dan Bangunan senilai Rp90.498.000,00 Nomor 14/KM.6/WKN.08/KNL.03/2022. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp4,535,938,800,00, masih menunggu berkas kelengkapan dari satker. Sedangkan penetapan status penggunaan berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp4.874.610.500,00, telah terbit PSP kendaraan bermotor roda 4 (empat) senilai Rp491.500.000,00 Nomor 14/KM.6/WKN.08/KNL.03/2021;
  - 4) Satker telah melakukan reklas Gedung dan Bangunan senilai Rp518.072.000,00 dari kondisi rusak berat menjadi rusak ringan;
  - 5) Satker telah melakukan permohonan persetujuan penghapusan BMN ke KPKNL berupa peralatan dan mesin/kendaraan mini bus yang hilang karena sebab pencurian senilai Rp153.900.000,00 telah terbit Surat Persetujuan Penghapusan Selain Tanah dan/atau Bangunan Nomor S32/MK.6/WKN.08/KNL.03/2022 tanggal 23 Februari 2022. Satker telah bersurat ke Badan Litbang Pertanian Nomor B-435/PL.320/H.10/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Badan Litbang Pertanian telah bersurat ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melalui surat Plt. Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor B325/PL.320/H/04/2022 tanggal 26 April 2022 hal Permohonan Keputusan Penghapusan BMN dan saat ini masih menunggu persetujuan Menteri Pertanian;
  - b. Satker sudah memperbaiki CaLK terkait mutasi kurang berupa penyerahan peralatan dan mesin kepada masyarakat (kegiatan RPIK) senilai Rp4.158.637.208,00.
  - c. Sampai dengan 31 Desember 2021, Penanggung Jawab Kegiatan Hibah belum merealisasikan anggaran Hibah. Namun sesuai dengan CHR RKA-K/L Revisi Realokasi Anggaran Tahun 2022 Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada bulan Februari tahun 2022, Tim Itjen telah merekomendasikan kepada Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian untuk membuat komitmen dengan tim pelaksana Hibah agar bisa menyelesaikan kegiatan di tahun pertama ini, sebelum terbitnya Perpres Badan Baru.
- B.**
- 1) Penjab kegiatan Hibah telah membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan di tahun pertama sebelum terbitnya Perpres Badan Baru dengan diketahui oleh Kepala BB Pascapanen;
  - 2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menyampaikan dan melakukan koordinasi serta negosiasi dengan AFACI terkait perubahan dan tusi Badan Baru untuk kegiatan di tahun kedua dan ketiga melalui surat Kepala Badan Litbang Pertanian No. B985/KL.010/H/10/22 tanggal 3 Oktober 2022.
- C.**
- 1) Kepala BB Pascapanen telah memastikan perencanaan setiap penelitian dengan baik, dan dilaksanakan secara konsisten serta

pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan secara tertib dengan meningkatkan pengendalian intern;

- 2) Kepala BB Pascapanen telah melakukan koordinasi dengan PPK Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mengesahkan proposal terhadap RAB yang telah disahkan;
  - 3) Kepala BB Pascapanen telah menyesuaikan jumlah panitia tidak melebihi 10% dari jumlah peserta yang hadir baik secara daring maupun luring;
  - 4) RAB telah direvisi sesuai saran dari tim audit yaitu: a) honorarium Ketua Pengarah dirubah menjadi honorarium Pengarah; b) volume dan harga satuan seminar kit telah dirinci; c) bahan pendukung/pembantu launching dan pameran telah dirinci; d) saran transport lokal ditiadakan karena dana tidak cukup; e) alokasi perjalanan dinas telah disesuaikan dengan jumlah personil yang akan didanai.
- a) Belanja bahan untuk momento telah direvisi dan disesuaikan dengan jumlah narasumber dan moderator;
  - b). Alokasi honor Ketua Pengarah telah direvisi menjadi Pengarah dan sudah sesuai SBM TA 2021;
  - c). Anggota Panitia direvisi menjadi 39 orang. Absen luring dan daring sebanyak 400 orang, sehingga memenuhi syarat bahwa honor anggota panitia 10% dari total peserta yang hadir;
  - d). Belanja bahan berupa seminar kit telah direvisi pada RAB (Revisi RAB dan data dukung kuitansi terlampir); (lampiran 1, lampiran 5)
  - e. Bahan pendukung/pembantu launching dan pameran telah direvisi dan dirinci.

### F.3 Belanja Akun Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pada Tahun Anggaran 2022 Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian mendapat pagu anggaran COVID-19 sebesar Rp3.800.000,00 yang dialokasikan untuk Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu biaya Swab antigen. Sampai dengan periode 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.775.000,00 atau 46,71% dengan rincian sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.800.000,00	1.775.000,00	2.025.000,00
	Jumlah	3.800.000,00	1.775.000,00	2.025.000,00

Pada tahun anggaran 2022 Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian tidak ada alokasi pagu anggaran belanja akun COVID-19 yang digunakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### F.4 Hibah

Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian telah menerima dana hibah untuk kegiatan Pembentukan Jejaring Basis Data Komposisi Pangan Asia (*Establishment of Asian Food Composition Database Network*) dengan AFACI untuk periode 3

tahun (Juli 2021 – Juni 2024) sebesar 90.000USD dan telah mendapatkan nomor register 2EGMQPNA. Pada bulan bulan November 2021 telah masuk dana hibah sebagai pendapatan untuk tahun pertama ke rekening RPL 140 PDHL BBPASCAPANEN sebesar Rp424.050.000,00. Dari nilai tersebut telah dilakukan revisi dengan penambahan pada alokasi pagu anggaran DIPA BB Litbang Pascapanen Pertanian pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp355.854.000,00. Dalam masa pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama telah dilakukan pengesahan SP2HL belanja dengan nomor 00276A tanggal 8 November 2022 dan telah terbit SPHL dengan nomor tanggal 9 November 2022 sebesar Rp355.160.812,00. Dari pendapatan di tahun pertama sebesar Rp424.050.000,00 dan telah di revisi ke DIPA sebagai belanja sebesar Rp355.854.000,00 terdapat saldo pendapatan di rekening sebesar Rp68.196.000,00. Sedangkan dari alokasi pagu anggaran pendapatan hibah di DIPA sebesar Rp355.854.000,00 dan telah di lakukan pengesahan belanja sebesar Rp355.160.812,00, terdapat saldo akhir kegiatan tahun pertama sebesar Rp693.188,00.

Pada tanggal 12 Desember 2022 telah masuk dana hibah ke rekening RPL 140 PDHL BBPASCAPANEN sebagai pendapatan pada tahun ke dua sebesar Rp465.120.000,00. Dari pendapatan tersebut, telah dilakukan pengesahan SP2HL pendapatan dengan nomor 00346A tanggal 31 Desember 2022 dan telah terbit SPHL dengan nomor 221400000000066 tanggal 21 Desember 2022. Adapun rincian atas pengesahan SP2HL pendapatan tersebut adalah saldo awal, sebagai saldo akhir kegiatan tahun pertama yang telah disahkan sebesar Rp693.188,00 ditambah saldo pendapatan di rekening bank atas kegiatan tahun pertama sebesar Rp68.196.000,00 dan dana hibah yang masuk ke rekening bank sebagai pendapatan pada tahun kedua sebesar Rp465.120.000,00.

Dengan demikian dana hibah yang telah masuk ke rekening RPL 140 PDHL BBPASCAPANEN sebagai pendapatan yang telah disahkan baik pada tahun pertama dan kedua sebesar Rp889.170.000,00 dan telah disahkan sebagai belanja sebesar Rp355.160.812,00. Sehingga saldo akhir pendapatan dana hibah sebesar Rp534.099.188,00.